

Analisis Kebijakan Transisi Pemerintahan Desa Dimasa Pandemi Covid-19

Toar P.A. Tambayong¹

Sarah Sambiran²

Donald K. Monintja³

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui bentuk-bentuk kebijakan transisi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teep Trans dan lebih jauh dari itu memeriksa apakah kebijakan tersebut telah sesuai kriteria kebijakan transisi yaitu menjamin keadilan, mewujudkan efektivitas pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin terwujudnya politik transformatif. COVID-19 telah mengakibatkan proses perubahan dalam sifat realitas sosial dan hubungan antar manusia. Perubahan tersebut terlihat dari transisi ke mode interaksi online, pemakaian masker dan membawa pembersih tangan, hingga penggantian jabat tangan dengan ketukan siku atau “salam simbolik” dan model kunjungan ke pasar dengan belanja online, serta aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan dari rumah. Pembatasan sosial telah memaksa masyarakat tinggal di rumah, bekerja, sekolah, hingga beribadah juga harus dilakukan di rumah. Terkecuali bagi mereka yang memang harus beraktivitas di luar rumah. Perubahan ekstrem ini telah memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, serta bagi banyak sektor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa Teep Trans telah menetapkan kebijakan-kebijakan transisi dimasa pandemi yang tujuan untuk keamanan masyarakat desa dari bahaya pandemi. Dalam kebijakan tersebut ada pro dan kontra dari masyarakat, namun akhirnya menerima dan turut aktif mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah desa Teep Trans melakukan penyaluran bantuan berupa Masker, handsanitizer, ember cuci tangan, penyemprotan disinfektan, sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kata Kunci : Analisis, Kebijakan Transisi, Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Argumen studi ini bahwa peran Pemerintah Desa sangat sentral dalam masa transisi, sehingga pemerintah Desa perlu mengembangkan pendekatan kebijakan yang sistematis dan berprinsip untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat desa saat Pandemi Covid-19. Karena itu kebijakan transisi Pemerintah Desa tidak hanya penting sebagai suatu tindakan pemerintah biasanya, tetapi jauh lebih penting untuk menjamin keadilan, mewujudkan efektivitas pemulihan sosial-ekonomi dan menjamin terwujudnya politik transformatif.

Ada dua alasan memilih topik ini yaitu alasan empiris dan alasan teoritis. Secara empiris penelitian ini dilakukan karena:

Pertama, Sejak awal Tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan paling mendesak dan sulit yang dihadapi umat manusia abad ini. Data per 16 Desember 2021 terdapat 4,26 Juta penduduk Indonesia yang terpapar dari total 272 juta penduduk dunia yang terpapar. Dan yang meninggal ada 144 ribu dari 5,33 juta penduduk dunia yang meninggal akibat covid-19 (*Kompas.com - 16/12/2021, 17:22 WIB*). Untuk Sampai saat ini pandemi ini terus berlangsung dan kebijakan berdamai dengan virus ini melalui New-Normal telah dijalankan oleh pemerintah melalui vaksinasi masal.

Kedua, Dampak Covid-19 bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga telah menimbulkan banyak sekali kerugian ekonomi dan tekanan sosial akibat pembatasan sosial dan model adaptasi baru terhadap kehidupan New-Normal. Data hasil riset Semeru Reserch Institute menunjukkan Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai pada bulan Oktober-November 2020 mengalami penurunan pendapatan dari yang mereka terima pada bulan Januari 2020. Kemiskinan meningkat di pedesaan 1 dari 10 orang di desa hidup

di bawah garis kemiskinan (Semeru Institute, 2021). Realitas ini menunjukkan Desa mengalami dampak yang sangat serius akibat pandemic Covid-19.

Ketiga, Kebijakan realokasi Dana Desa telah dilakukan selama Tahun 2020 dan 2021 untuk memfokuskan kebijakan penanganan pandemi di desa. Itu artinya peran sentral pemerintah untuk mengintervensi melalui kebijakan secara struktural di tingkat desa telah dilakukan. Hal ini penting dianalisis untuk melihat sejauh mana intervensi struktural ini berdampak bagi kehidupan masyarakat desa di masatransisi untuk menuju pada pola tranformasi kehidupan di masa new-normal.

Secara Teoritis, literatur tentang penelitian kebijakan pemerintah desa di masa pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan berbagai topik. Misalnya oleh Putri dan Hidayat (2020); Valentina, dkk (2020); Faturrahman, dkk (2020); Sandhi (2020); Hidayat (2021); Rahayu dan Sugiri (2021); Apriani (2021); Syam (2021). Penelitian-penelitian tersebut sangat baik menjadi referensi dalam penelitian lanjutan tentang kebijakan pemerintah desa.

Namun secara spesifik paradikma penelitian-penelitian tersebut belum ditujukan untuk melihat kebijakan pemerintah desa sebagai sebuah kerangka kebijakan transisi menuju New-Normal di tengah pandemi yang masih berlangsung. Selain itu, studi-studi yang dilakukan masih melihat proses kebijakan sebagai fokus utama, dan tidak meletakkan masyarakat sebagai subjek kebijakan sebagai aspek yang penting untuk diteliti. Studi kebijakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, melengkapi paradikma yang telah berkembang dalam penelitian kebijakan pemerintah desa dimasa pandemic Covid-19.

Berdasarkan fakta-fakta empiris dan paradikma teoritis tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk

mengkaji dan menganalisis Kebijakan Transisi Pemerintah Desa Di Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teep Trans Tahun 2020 dan 2021.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan dengan cara *Key Person*, dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informasi penelitian (Bungin, 2011:77). Dengan demikian, informan yang hendak dilakukan wawancara mendalam adalah;

- 1) Hukum Tua
- 2) Ketua BPD
- 3) Perangkat Desa 3 Orang

Penelitian ini memiliki dua fokus utama yaitu:

- 1) Mengidentifikasi bentuk kebijakan transisi apa saja yang telah dilakukan pemerintah Desa Teep Trans
- 2) Fokus kedua adalah menganalisis jenis kebijakan transisi yang telah dilakukan di Desa Teep trans dengan menggunakan kerangka analisis Green (2018) yang mengembangkan tiga kriteria kebijakan transisi.
 - Kriteria pertama yang dikemukakan adalah "fairness" atau adil.
 - Kriteria kedua Efektivitas yang diharapkan.
 - Kriteria ketiga yaitu Potensi transformasi politik

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini telah dilaksanakan wawancara guna mendapatkan hasil yang dianggap dapat menjawab hal-hal yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini peneliti tentu mewawancarai mereka yang dianggap mampu menjelaskan dan mereka yang mengetahui secara detail mengenai hal-hal yang terjadi di desa Teep Trans. Pemerintah Desa Teep Trans tentunya

memiliki kebijakan-kebijakan yang telah disepakati untuk ditindak-lanjuti, berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebelum adanya pandemi:

- 1.3.1 Anggaran perbaikan Jalan, dan Drainase Rp. 141.423.500
- 1.3.2 Sub Bidang kesehatan Rp.91.795.500
- 1.3.3 Sub Bidang Pendidikan Rp.13.200.000
- 1.3.4 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 15.000.000
- 1.3.5 Sub Bidang Keadaan Darurat Rp.20.000.000
- 1.3.6 Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp.316.800.000
- 1.3.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa Rp.5.000.000
- 1.3.8 Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan Kearsipan Rp.2.631.500 (*Sumber : Laporan Penganggaran APBDes Teep Trans Tahun 2019-2020*)

Dan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kebijakan transisi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah ditengah kondisi pandemi covid-19, peneliti telah mewawancarai beberapa narasumber, berikut pernyataan dari Ibu Silvana selaku Hukum tua desa Teep Trans :

"Dalam menghadapi masa sulit disaat pandemi kami selaku pemerintah desa tentu mengupayakan agar masyarakat kami terhindar atau tidak terkontaminasi dengan virus ini, makanya kami menerapkan protokol kesehatan untuk semua masyarakat. Sempat kami melakukan penutupan akses bagi mereka yang baru datang dari luar, misalnya dari Manado yang kalah itu menjadi zona merah. Setidaknya kami juga mendapatkan keluhan dari orang tua dari anak-anak yang mengemban pendidikan di Manado sana karena dengan adanya larangan untuk masuk ke Desa anak mereka menjadi bagian dari orang-orang yang tidak diijinkan untuk memasuki daerah desa Teep.

Kemudian peneliti menanyakan kira-kira apa saja kebijakan yang pemerintah desa ambil disituasi pandemi

saat ini, dan apakah ada dampak atau protes dari masyarakat?

Menurut Ibu Silvana : *"Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam masa pandemi:*

- 1) *pertama kami mengikuti intrupsi dari atas melarang atau membatasi wilayah desa kami dari kunjungan luar apalagi dari zona merah. Jadi kami menutup akses bagi mereka yang mau pulang kampung, menutup ases untuk tamu dari luar karena kami tidak mau mengambil resiko dengan adanya kunjungan tersebut karena kami tidak tau orang atau tamu tersebut dari mana saja, sudah melakukan kontak dengan siapa saja.*
- 2) *Melarang masyarakat melakukan perjalanan untuk sementara waktu keluar desa, maupun keluar daerah kabupaten.*
- 3) *Menghimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan, misalnya pesta kawin, ibadah dilaksanakan secara online, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Yang tentu ada kesempatan misalnya beribadah kami minta dalam 1 sesi gereja hanya berisi 30%-50% anggota jemaat dari biasanya, dengan catatan tetap menjaga jarak, dan bagi mereka yang tidak menggunakan masker tidak akan diijinkan ikut serta. Kemudian daripihak gereja, atau mereka yang akan mengadakan acara harus menyiapkan tempat mencuci tangan, thermometer untuk mengukur suhu tubuh, Handsanitizer dan memberikan jarak 1,5 meter untuk tempat duduk.*
- 4) *Kami melakukan penyemprotan disinfektan dirumah-rumah warga dan tempat beribadah*
- 5) *Selanjutnya kami melaksanakan penyaluran bantuan berupa alat-alat kesehatan seperti masker, handsanitizer, disinfektan, ember cuci tangan, dan sabun cuci tangan.*
- 6) *Kami melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai.*
- 7) *Dan Kebijakan yang paling berbeda yang kami ambil adalah mengalokasikan dana APBDes ke*

dana penanggulangan Covid-19 yang tujuannya memang untuk membantu disituasi krisis akibat pandemi ini. Yang sebenarnya dana tersebut sudah disepakati untuk pembangunan desa dalam hal ini pembuatan jalan-jalan yang memang sudah rusak sehingga harus diperbaiki.

Dari semua kebijakan tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra bagi kami pemerintah karena tentu ada poin yang dirasa berat oleh masyarakat. Karena ada dampak yang harus diterima, misalnya bagi masyarakat yang sering keluar karena memang pekerjaan mengharuskan mereka untuk keluar, akhirnya protes kepada kami masyarakat karena menganggap dengan adanya kebijakan tersebut mereka tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga mereka. Kemudian untuk akses masuk ke desa, tentu ada juga banyak anak-anak yang sekolah diluar tidak bisa pulang karena pembatasan ini."

"selanjutnya untuk menghadapi kondisi buruk akibat pandemi ada beberapa kebijakan pemerintah desa yang berubah salah satunya yaitu mengalokasikan dana Desa untuk pencegahan pandemi covid-19. Yang kalau dari kami pemerintah sebelumnya sudah sepakat bahwa dana tersebut akan kami gunakan untuk memperbaiki jalan yang memang sudah rusak, masyarakat sering mengeluh karena jalan yang rusak makanya kami sudah rencanakan penganggaran dana APBDes untuk pembuatan jalan. Namun karena covid semua keputusan yang telah disepakati berubah. Kami juga memberikan pengertian kepada masyarakat supaya tidak mempeributkan tentang perbaikan jalan terlebih dahulu karena memang untuk saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi bahaya dari pandemi covid-19. Dan dari penjelasan kami masyarakatpun memahami karena dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini salah satunya adalah masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan seperti sebelumnya. Yang pastinya akan menyebabkan kesusahan dalam perekonomian. Maka dari itu kami

fokuskan dana APBDes untuk kepentingan menghadapi pandemi.”

Berdasarkan dengan jawaban dari Ibu hukum tua saya kemudian menanyakan kepada salah satu anggota masyarakat yakni Ibu Riva dan suami yang kalah itu anaknya termasuk orang yang tidak diizinkan memasuki wilayah desa Teep Trans:

“Menurut kami apa yang menjadi kebijakan pemerintah desa dalam hal menutup akses sebenarnya memberikan kami rasa aman, karena berpikir bahwa kami akan terhindar dari virus yang menggemparkan yang tentunya menakutkan karena kami juga melihat banyak yang meninggal karena virus ini. Namun disatu sisi sebagai orang tua kami agak kecewa karena anak kami menjadi salah satu diantara mereka yang tidak diberikan akses untuk masuk kewilayah desa. Kami tidak akan protes pastinya jika diperlakukan merata, tetapi yang kami lihat ada beberapa anak-anak yang bahkan dari luar daerah diizinkan masuk diwilayah desa. Tentu hal ini membuat kami merasa tidak adil sebagai masyarakat dan orang tua”.

Menanggapi apa yang disampaikan Ibu Riva, Hukum Tua dan Sekertaris Desa memberikan jawaban:

“Sebenarnya memang ada anak-anak yang pada saat itu diizinkan aksesnya untuk pulang kerumah tetapi mereka pada saat itu pulang disaat keadaan belum semenggemparkan saat anak dari Ibu itu akan pulang. Jadi kami memberikan ijin karena anak-anak yang datang pada saat itupun melakukan Rapid test dan setelah itu melakukan isolasi mandiri.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yakni bapak Alex, menurut beliau :

“Memang sebenarnya sayang juga serta kasihan anak-anak yang menuntut ilmu terus tidak diberikan akses masuk untuk pulang kerumah. Namun kita juga memperhitungkan resiko bagi masyarakat yang umurnya sudah lanjut dan tentu ada banyak anak-anak dan balita. Jadi kebijakan pemerintah ini memang menurut kami para tokoh masyarakat adalah tepat, dan pasti kebijakan ini bukan hanya ada di

desa kami melainkan ada dibanyak wilayah.”

Dalam hal melakukan kebijakan tentu itu diperintahkan dari pusat, berlanjut pertanyaan untuk Ibu Hukum Tua dan aparat desa lainnya. Dalam menghadapi masa pandemi apa saja bantuan yang sudah disalurkan kepada masyarakat dan apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran?

Jawab Ibu Silvana *“tentu ada banyak bantuan yang telah disalurkan karena arahan dari pusat diantaranya Masker, Handsanitizer, Ember tempat cuci tangan, Sembako, Sabun, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sesuai dengan arahan dari pusat tentu sudah seharusnya bantuan ini tepat sasaran, mengapa saya katakan bahwa penyaluran bantuan di desa Teep Trans sudah tepat sasaran karena ini diawasi langsung oleh pemerintah pusat.*

Bapak Febrio Lengkong selaku sekertaris desa juga menambahkan *“dalam hal penyaluran bantuan kami semaksimal mungkin menghindari adanya tidak kecurangangan dan tentu menjaga ketat proses penyaluran. Mereka yang berstatus sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pensiunan tidak berhak menerima bantuan tersebut. Mereka yang berhak adalah mereka dengan kondisi ekonomi dibawah, mereka yang kehilangan pekerjaan diakibatkan pemutusan hubungan kerja, bahkan yang terpaksa berhenti karena pandemi, janda/duda.*

Tentu peneliti juga menanyakan hal serupa dan bagaimana tanggapan dari masyarakat Ibu Gloria: *“Benar kami mendapatkan bantuan dari pemerintah sama seperti yang kami lihat dari berita yang tentunya ini berarti program dari pemerintah pusat. Sangat bersyukur bisa menjadi penerima bantuan tersebut, karena menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan saat itu sangat sulit, jaid menurut saya bantuan yang disalurkan itu adil dan sangat membantu. Tapi tentu dalam setiap proses pasti ada masalah karena banyak pula masyarakat yang beranggapan bahwa proses pembagian ini pilih-pilih atau hanya melihat kenalan*

bahkan orang-orang terdekat yang pasti menikmati. Karena kalau boleh jujur masih ada saja orang yang dapat dikatakan berkecupan masih menerima bantuan, dan menurut sepengetahuan saya nama-nama ini berasal dari pusat tetapi yang menjadi pertanyaan mengapa bisa diganti oleh pemerintah desa? Tentu ada banyak juga yang kecewa karena di awal penyaluran BLT mereka menerima bantuan tersebut, namun pada program penyaluran kedua nama mereka tidak ada.

Kemudian peneliti mewawancarai Masyarakat yang namanya diganti dalam daftar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni Bapak Nico, menurutnya :

“iya benar untuk tahap pertama saya menerima bantuan tersebut, dan tentu sangat bermanfaat dan membantu dimasa sulit. Tetapi di tahap kedua saya sudah tidak ada dalam daftar penerima bantuan tersebut, dan ada masyarakat sebelumnya yang tidak terdaftar ditahap pertama, setelah ditahap kedua dia ada didaftar penerima bantuan tersebut. Setelah itu saya agak kecewa dengan kebijakan tersebut karena saya pikir bahwa daftar nama-nama penerima bantuan memang berasal dari pusat dan tidak bisa diubah. Yah tetapi mungkin belum berkat saya, jadi saya sudah iklaskan.”

Setelah itu saya juga mendapatkan jawaban dari Sekertaris desa yang katanya: *“Memang benar bahwa dalam setiap penyaluran bantuan ada perubahan-perubahan daftar penerima. Tetapi maksud dari kebijakan yang diambil itupun adalah untuk membuat semua masyarakat dapat merasakan dan terbantuan dengan adanya bantuan dari pemerintah. Kami pemerintah juga mengupayakan agar supaya kalau bisa semua nama-nama masyarakat atau perkepala keluarga bisa masuk dalam daftar penyaluran bantuan, kami mengupayakan agar supaya semuanya tepat sasaran.”*

Disisi lain ada banyak repons positif terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, salah satunya dari Ibu Fane : *“Kami sangat berterimakasih*

kepada pemerintah pusat, daerah, lebih khusus pemerintah desa yang telah mengupayakan yangt terbaik bagi kami anggota masyarakat dapat menikmati dan terbantuan dengan adanya bantuan-bantuan yang disalurkan. Dalam menghadapi masa krisis ditengah pandemi, banyak mata pencaharian kami tertutup, banyak yang karena takut terkena dampak virus akhirnya berdiam diri dan menutup usaha termasuk saya. Tapi dengan adanya bantuan dari pemerintah dangat-sangat membantu krisis ekonomi dampak dari pandemi ini.”

Menurut Ibu Silvana dalam menanggapi masyarakat yang protes :*“Saya sudah melakukan apa yang saya rasa paling terbaik untuk membantu masyarakat dan dalam hal ini saya juga tidak mau membuat masyarakat saya merasa dirugikan karena ada perubahan-perubahan dalam penyaluran bantuan. Maka dari itu saya sampai saat ini berupaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebaik mungkin supaya bisa berdampak positif bagi masyarakat dan sangat saya upayakan kedepan semua masyarakat merasakan bantuan secara merata.”*

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Hukum Tua dan Aparat desa: apakah efek yang diharapkan dengan adanya bantuan ini ? kemudian jawab Ibu Silvana *“Dalam hal ini saya hanya mengharapakan dapat membantu dan mengurangi beban dalam hal perekonomian yang tidak stabil ini, karena saya sendiripun pastinya juga merasakan dampak dari pandemi ini. Apalagi masyarakat yanghidup dengan kekurangan.”*

Peneliti juga menanyakan apakah dalam hal penyaluran bantuan ini terselip motif politik? Jawab Ibu Hukum Tua

“Dalam hal ini sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan politik. Kenapa saya katakan demikian, untuk apa menyelipkan unsur politik dalam penyaluran bantuan ini yang pada dasarnya memang hak rakyat. Kami sebagai pemerintah hanya menjalankan tugas kami sebaik mungkin sesuai dengan tanggung jawab kami. Apalagi program ini

memang dari pusat, kami sebagai pemerintah desa Teep Trans tugasnya adalah untuk memperjuangkan hak masyarakat di desa Teep Trans.”

Dengan pertanyaan yang sama peneliti mencoba mewawancarai kepala Lingkunga yang ada di Desa Teep Trans, mulai dari Bapak Ishak yang merupakan kepala lingkungan I, menurutnya :

“Saya bicara sebagai kepala lingkungan dan tentu sebagai anggota masyarakat. Dalam hal penyaluran bantuan selama covid saya sendiri tidak menemukan unsur politik dibalikinya, karena semua memang berjalan sesuai alurnya, jadi menurut saya tidak ada.

Seperti dengan jawaban Bapak Ishak para kepala lingkungan lainnyapun juga mengatakan hal yang sama bahwa tidak ada unsur politik dalam penyaluran bantuan ini. Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan serupa kepada masyarakat, dan apakah ada pembahasan/singgungan tentang politik dalam penyaluran. Menurut ibu Anatje Sariowan :

“Sampai saat ini sebagai masyarakat belum pernah mendengar hal tersebut secara langsung dari pemerintah desa. Kalau dengar pernah tapi itu dari gosip-gosip warga yang mereka juga tidak tau apakah itu benar adanya. Kalau saya sendiri selama belum atau tidak saya dengar langsung saya tidak percaya, apalagi memang tidak ada buktinya.”

Saya kembali menanyakan kepada Ibu Hukum Tua dan perangkat desa, kira-kira apa saja dukungan masyarakat dalam situasi pandemi? Jawab Ibu hukum tua :

“Tentu kami pemerintah mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun pasti awalnya ada penolakan tapi masyarakat juga tau seberapa serius kondisi saat ini jadi mereka memberikan dukungan mereka lewat mengikuti semua kebijakan yang diambil pemerintah. Mereka menghindari kerumunan, tidak melakukan aktifitas diluar, menyiapkan tempat cuci tangan didepan rumah masing-masing, tetap mengikuti protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi guna memperkuat ketahanan daya tahan tubuh.

Dan sampai saat ini bersyukur desa Teep Trans masih terlindung dari bahaya Covid”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Daniel warong anggota masyarakat lingkungan 2 *“Kami selaku masyarakat ingin yang terbaik, pemerintah desa tentu tau betul tugas dan tanggung jawabnya. Tugas kami sebagai masyarakat hanya mendukung setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Yang menurut kami akan berdampak juga bagi kelangsungan kami bertahan dimasa pandemi.”*

Selanjutnya melihat kebijakan yang diambil pemerintah desa Teeptans sebagian besar memang berdasarkan perintah dari pusat. Peneliti kemudian menanyakan kepada masyarakat, apakah pemerintah desa Teep Trans tidak pernah terlibat dengan skandal yang tentu mengurangi simpatik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? jawaban pertama diberikan oleh ibu Hutri yang merupakan seorang warga dan anggota pimpinan BUMDES, menurut ibu Hutri:

“Ada skandal yang membuat kami kurang simpatik kepada pemerintah desa. Karena belum lama ini hukum tua dilaporkan anggota BUMDES, karena masalah menyangkut uang. Bahkan saat diselidiki tentang buku APBDES tahun 2020-2021 menurut hukum tua sudah hilang. Jadi menimbulkan berbagai macam pendapat dikalangan masyarakat dan tokoh masyarakat.”

Sesuai dengan jawaban dari ibu Hutri, peneliti kemudian menanyakan hal tersebut kepada salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan Hukum tua desa Teep Trans yaitu Bapak Alex Tambajong. Berikut jawaban dari Bapak Alex Tambajong :

“Benar adanya jika masyarakat untuk saat ini kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Karena jarang sekali terjadi hal seperti demikian. Mana bisa berkas penting itu bisa hilang, pasti semua orang akan menduga bahwa itu sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Tujuan dihilangkan atau disembunyikan apa? Yang pasti untuk menutupi sesuatu yang

mungkin merugikan diri sendiri. Kalau dari saya sebagai tokoh masyarakat hanya berharap hukum tua dapat memperlihatkan buku tersebut kalau tidak mau disangka macam-macam oleh masyarakat.”

Setelah mendapatkan jawaban dari Masyarakat dan Tokoh masyarakat peneliti kembali menanyakan kepada Hukum tua terkait dengan masalah tersebut. Berikut jawaban dari Ibu hukum tuan:

“Untuk buku APBDES memang benar sudah hilang, saya sendiri tidak bermaksud untuk menutupi sesuatu. Memang benar juga kalau saya telah dilaporkan oleh BUMDES terkait hal tersebut. Harapan saya semoga prosesnya berjalan lancar, saya belum bisa menjelaskan lebih kepada masyarakat karena pasti jawaban yang saya berikan akan berbeda pendapat dengan masyarakat.”

Kemudian peneliti menanyakan, apakah Ibu Hukum tua juga mengetahui simpatik masyarakat terhadap dirinya berkurang dengan adanya masalah tersebut, dan langkah apa yang akan diambil dalam mengatasi masalah ini?

Berikut jawaban Ibu Silvana : *“Saya sadar akan hal tersebut, skor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga turun drastis. Memang kalau berita sudah menyebar, pasti akan berbeda-beda penyampaiannya saya hanya mampu berusaha tetap tenang, nantikan akan ada bagian yang akan memimpin proses penyelidikan. Tapi saat ini kondisinya sudah stabil kembali, sikap masyarakat sudah kembali seperti biasanya. Langkah yang saya ambil adalah mengikuti setiap proses, berusaha tetap tenang juga walau bagaimanapun memang ada salahnya juga di saya karena menghilangkan sesuatu yang penting.”*

Berdasarkan jawaban-jawaban yang peneliti dapatkan selama proses penelitian berlangsung, memang benar adanya bahwa pemerintah desa Teep Trans membuat kebijakan-kebijakan disaat masa transisi, dengan tujuan untuk melindungi, meringankan dan mensejahterakan masyarakat di desanya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Green yang mengembangkan tiga kriteria kebijakan transisi.

- 3) Kriteria pertama yang dikemukakan adalah *“fairness”* atau adil.
- 4) Kriteria kedua Efektivitas yang diharapkan.
- 5) Kriteria ketiga yaitu Potensi transformasi politik.

Pembahasan

Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, yaitu teori Green, yang mengembangkan tiga kriteria kebijakan transisi yaitu: yang pertama *“Fairness”* atau adil, kedua Efektivitas yang diharapkan, ketiga Potensi Transformasi Politik. Dimana ini akan menjadi tolak ukur penilaian terhadap Kebijakan transisi yang diambil pemerintah desa Teep Trans pada masa pandemi. Sesuai dengan fakta yang peneliti temui dilapangan bahwa :

- a) *“Fairness”* atau adil

Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah tentu harus adil bagi masyarakat juga. Dalam hal kriteria pertama ini pemerintah desa Teep Trans melaksanakan penyaluran bantuan berupa masker, handsanitezer, ember cuci tangan, sembako sudah adil karena menyamaratakan semua masyarakat. Kemudian untuk bantuan langsung tunai diperuntukan bagi mereka masyarakat yang kurang mampu, orang tua, janda/duda, dan mereka yang diberhentikan kerja/PHK dimasa pandemi. Untuk point pertama sudah menurut peneliti sudah sesuai karena pemerintah desa Teep Trans memberikan bantuan tersebut dan mengupayakan semua masyarakatnya bisa mendapatkan atau merasakan bantuan dari pemerintah guna membantu perekonomian dimasa pandemi.

Dalam hal efek apa yang diharapkan dalam kebijakan penyaluran bantuan ini, pemerintah desa Teep Trans mengaharapkan

bahwa masyarakatnya dapat merasa terbantu, dan tidak perlu kuatir dalam menghadapi masa pandemi ini. Untuk pemerintah desa Teep Trans sendiri menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil itu untuk kepentingan dan keamanan bersama dalam melewati masa pandemi sehingga masyarakatpun turut memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Dalam penelitian yang peneliti lakukan di desa Teep Trans, proses penyaluran bantuan ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik, dan pemerintah desa hanya menjalankan tugasnya untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut.

b) Efektivitas yang diharapkan

Untuk efektivitas yang diharapkan pemerintah setelah mengambil kebijakan-kebijakan dimasa transisi adalah untuk melindungi masyarakat desa, khususnya mereka yang usia lanjut dan anak-anak balita. Menurut hasil penelitian, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah sukses karena faktanya sampai pada saat ini penduduk desa masih aman dan terhindar dari bahaya covid yang mengancam. Serta masyarakat antusias mendukung kebijakan pemerintah dengan melakukan vaksinasi membuat tujuan pemerintah desa lewat kebijakan berhasil. Bantuan-bantuan yang disalurkan kepada masyarakatpun juga berdampak positif, *pertama* masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan protokol kesehatan karena pada saat itu sudah sulit untuk mencarinya, ada tetapi dengan harga yang mahal.

Kedua sembako, ditengah masa pandemi harga sembako juga ikut naik, maka dengan adanya penyaluran bantuan ini masyarakat sudah merasa diringkankan dalam perekonomian bahan pokok. Ketiga adalah bantuan langsung tunai (BLT), mereka yang perekonomian dibawah tentu sulit menghadapi masa pandemi

ini, mereka yang lanjut usia, janda/duda, serta mereka yang diberhentikan kerja pada masa pandemi ini yang paling merasakan efek dari pandemi, namun dengan adanya bantuan dari pemerintah membuat mereka merasa diringkankan sehingga mereka tidak terlalu kuatir saat menghadapi masa pandemi.

c) Potensi transformasi politik

Dalam point ketiga ini sesuai dengan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa sampai pada saat ini dalam proses penyaluran bantuan tidak terselip unsur politik, yang artinya tidak ada ajakan untuk masyarakat tetap berpihak kepada pemerintah saat ini pada masa pemilihan nanti. Kemudian dukungan yang diberikan masyarakat untuk pemerintah karena masyarakat juga sadar kebijakan yang diambil oleh pemerintah semuanya untuk kepentingan dan keamanan bersama dan hal ini juga bukan hanya terjadi di desa Teep Trans.

Memang berdasarkan penelitian dilapangan ada juga kendala atau protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, namun seiring mereka tau bahwa hal ini serius maka mereka juga memberi dukungan. Berbicara masalah yang ada pada saat penyaluran bantuan khususnya Bantuan Langsung Tunai, sesuai fakta yang didapatkan dilapangan bahwa pemerintah desa bukan mengganti atau menghapus nama-nama masyarakat tetapi supaya semua turut merasakan manfaat dari bantuan tersebut maka diberlakukanlah sistem rolling, tetapi itu hanya berlangsung di 2 tahap penerimaan, selanjutnya berkat perjuangan pemerintah desa akhirnya semua kebagian dalam penyaluran bantuan ini.

Pemerintah Desa Teep Trans dalam upaya membantu dalam menanggulangi krisis ditengah pandemi telah mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu membantu meringkankan masyarakat dalam hal perekonomian.

Dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa yang sebelumnya sudah disepakati namun berubah karena adanya pandemi covid-19 adalah dana Desa yang seharusnya diperuntukan untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Desa Teep Trans yang sudah rusak dan memang dibutuhkan untuk perbaikan, namun dengan adanya pandemi dana tersebut dialihkan untuk membantu pemerintahan dan masyarakat dalam menghadapi bahaya covid-19.

Yang terjadi dimasa pandemi adalah Desa Teep berdasarkan kebijakan Pemerintah Desa, Aparat dan tokoh masyarakat mengambil keputusan untuk mengalihkan dana APBDES guna membantu krisis ditengah masa pandemi Covid-19. Pemerintah desa berupaya untuk membuat masyarakat tidak terlalu kuatir akan tetapi tetap waspada dalam menghadapi krisis pandemi ini.

Jika melihat pengaruh yang disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa Teep Trans tentu ada baik dan buruk persepsi dari masyarakat, karena sebagian besar masyarakat desa Teep Trans mengakui kecepatan pemerintah desa Teep Trans dalam mengambil keputusan dalam menghadapi situasi buruk akibat pandemi, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Teep Trans sampai pada saat ini masih aman dari bahaya Covid.

Upaya yang diambil pemerintah lewat kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak positif, masyarakat juga merasa terbantu dalam menghadapi krisis ekonomi ditengah pandemi. Ditengah krisis ekonomi akibat pandemi, pemerintah desa Teep Trans mampu menjadi cerminan bagi Pemerintah lain dalam mengambil tindakan yang cepat, akurat dan menguntungkan semua pihak.

Pada hakekatnya seorang Pemimpin harus mengambil kebijakan yang tentu memberikan hasil yang nampak, bermanfaat dan menguntungkan. Pemerintah Desa Teep Trans dalam menghadapi krisis yang terjadi akibat adanya pandemi covid ini menunjukkan

sikapnya yang bijaksana dalam mengambil keputusan, karena dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat tidak kuatir dengan apa yang akan mereka hadapi karena dari pemerintah desa cepat dalam memberikan pengertian kepada masyarakatnya. Akan tetapi dengan kebijakan yang diambil tersebut tidak 100% pastinya masyarakat menanggapi dengan positif. Karena masih ada pula yang merasa kebijakan yang dijalankan tersebut tidak adil untuk beberapa pihak, bagi mereka yang tidak terdaftar dalam penerima bantuan, atau bagi mereka yang merasa namanya diganti dengan nama orang lain.

Intinya adalah semua kebijakan tidak sepenuhnya sempurna namun dari kebijakan tersebut kita bisa melihat karakter dari pemimpin tersebut, bagaimana dia memberikan keputusan dan seperti apa kecepatannya dalam merumuskan suatu masalah dalam pemerintahan.

Penutup

1. Pemerintah desa Teep Trans telah menetapkan kebijakan-kebijakan transisi dimasa pandemi yang tujuan untuk keamanan masyarakat desa dari bahaya pandemi. Dalam kebijakan tersebut ada pro dan kontra dari masyarakat, namun akhirnya menerima dan turut aktif mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah desa mengupayakan tercapainya kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan bersama, tanpa ada unsur politik. Pemerintah Desa Teep trans mengambil kebijakan transisi dengan mengalihkan dana APBDES untuk mengatasi dan membantu masyarakat dalam menghadapi krisis pandemi, sehingga dari kebijakan transisi tersebut masyarakat merasa tertolong apalagi dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil.
2. Pemerintah desa Teep Trans melakukan penyaluran bantuan berupa Masker, handsanitizer, ember cuci tangan, penyemprotan disinfektan, sembako dan Bantuan

Langsung Tunai (BLT). Dalam penyaluran ini pemerintah mengupayakan supaya semua warga masyarakat menikmati manfaat yang diterima. Dalam penyaluran ini harapan pemerintah adalah masyarakat merasa terbantuan dan tetap mengikuti protokol-protokol serta kebijakan yang pemerintah ambil. Kebijakan yang diambil pemerintah juga mengenai pengalokasian dana APBDes yang sebelumnya telah dianggarkan untuk perbaikan jalan namun dengan adanya pandemi dana tersebut kemudian dialihkan sebagai dana persiapan dalam menghadapi pandemi covid 19. Masyarakat turut memberi dukungan dengan melakukan vaksinasi, mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat juga merasa diringankan dan tidak terlalu kuatir dalam menghadapi kondisi pandemi.

Saran

1. Untuk pemerintah, dalam kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil dimasa transisi ini tentu sudah tepat, akan tetapi kembali lagi bagaimana pemerintah menjelaskan kondisi yang saat ini terjadi kepada masyarakat, supaya masyarakat akan lebih mudah memahami apa yang harus diperbuat. Dalam hal perubahan daftar nama penerima bantuan, ini merupakan hal yang sangat sensitif tentunya bagi masyarakat apalagi jika tidak ada penjelasan sebelumnya pasti akan menimbulkan konflik diantara masyarakat dan beranggapan bahwa pemerintah desa sembarangan mengganti nama mereka atau pemerintah desa lebih mendahulukan si A karena si A keluarga, kerabat atau pendukung dari pada mereka. Jadi untuk kedepan supaya semuanya dilakukan secara transparan bukan hanya diantara aparat desa saja.
2. Untuk masyarakat, dalam hal ini tentu masyarakat harus bersyukur karena ada program yang membantu meringankan kebutuhan

perekonomian. Akan tetapi seperti sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan sudah bisa melakukan aktifitas seperti semula, jadi masyarakat jangan terlalu bergantung kepada bantuan-bantuan tersebut apalagi mereka yang masih bisa bekerja. Dan apabila ada keluhan atau rasa kurang atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa bisa langsung menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah desa. Jangan hanya membiarkan rasa ketidakadilan itu tertanam dihati kemudian disebarkan dilingkungan masyarakat akhirnya terjadi perpecahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Eko, Sutoro. Dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) : Yogyakarta
- Faturrahman, Fadli dkk. 2020. "Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Moyo Hulu". dalam *Jurnal Tambora*, 4(2A): 33-40.
- Green, Fergus. 2018. *Transition policy for climate change mitigation: Who, what, why and how*. Crawford School of Public Policy. ANU
- Hidayat, Endik. 2020. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang". dalam *Jurnal Soetomo Coomunication and Humanities*. 1(3) : 126-136.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi terbaru*. Yogyakarta:
- Andi.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi)

- Cetakan ke-37. Remaja
Rosdakarya: Bandung
- Nugroho, Riant. 2018. *Publi Poliy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik edisi-6.* Elex Media: Jakarta
- Syam, Try Wahyudin. 2021. *Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.* Skripsi, Universitas Muhamadiyah, Makasar.
- Tuwu, D. (2020, juli). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Journal Publicuho, VOL 3. NO 2.*